

PULUHAN TAHUN TAK BISA PULANG Mahfud Jemput Eksil Korban HAM

JAKARTA (KR) - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku bakal berkunjung ke sejumlah negara di Eropa. Kunjungan tersebut untuk menemui para eksil korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu dalam rangka menjemputnya kembali ke Tanah Air. "Habib ini saya akan mengunjungi beberapa negara Eropa, siapa yang mau pulang, mereka punya hak warga negara," kata Mahfud dalam rapat kerja bersama Komite I DPD RI di kompleks parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (4/7).

Mahfud menyebutkan akan mengatur jadwal kunjungannya ke sejumlah negara di Eropa, usai *kick off* penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu secara non-yudisial digelar di Aceh pada Selasa (27/6). "Nanti, kan banyak itu ada 12 negara kalau enggak salah yang masih ada warga negara kita yang eks 'Mahid' (mahasiswa ikatan dinas), yang eksil itu, ndak apa-apa nanti dijadwalkan, ini kan baru *kick off*," ujarnya.

Mahfud menjelaskan bahwa negara harus turun tangan demi kemanusiaan, sebab para eksil tersebut telah puluhan tahun berada di luar negeri dan tidak bisa pulang ke Tanah Air pasca-peristiwa 1965. "Ndak boleh pulang karena terjadi peristiwa '65, sampai 58 tahun, bayangin nggak 58 tahun, sejak umur 23 tahun, sampai umur 81-82 sekarang, lebih banyak yang sudah meninggal lagi di luar negeri, kita harus turun tangan demi kemanusiaan," tegasnya.

Mahfud juga menceritakan kerinduan para eksil untuk kembali ke Tanah Air yang tak kunjung terealisasi hingga di penghujung akhir hayatnya. "Ada beberapa orang, Pak saya sudah 58 tahun enggak bisa (pulang) Pak, saya ingin pulang ke Indonesia, ingin mati di Indonesia'. Kita jemput, mereka korban, bukan pelaku," ucapnya. (Ant/Has)-d

Bupati Grobogan Ajukan Raperda Penyertaan Modal BUMD ke Dewan



GEMA DPRD KAB. GROBOGAN



GROBOGAN (KR) - DPRD Grobogan menggelar rapat paripurna penjelasan Bupati atas Raperda tentang Penyertaan Modal Pemkab Grobogan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tahun anggaran 2024, Selasa (4/7). Rapat dipimpin Ketua DPRD Agus Siswanto SSos MAP, dihadiri langsung Bupati Hj Sri Sumarni SH MM, anggota Forkopimda, Sekda beserta para Asisten Sekda, para Staf Ahli Bupati, para Kepala OPD, para Kabag Setda, para Camat dan para Direktur BUMD setempat.

Dalam penjelasannya, Bupati mengatakan, berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disetorkan dalam tahun anggaran

berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.

"Mendasari ketentuan tersebut, saya mengajukan Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2024, untuk dilakukan pembahasan dan penyempurnaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat disetujui bersama pada saatnya nanti," terangnya. Tujuan penyertaan modal tersebut, lanjut bupati, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, penguatan BUMD, meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah, dan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

Tentang besarnya penyertaan modal kepada BUMD tahun anggaran 2024, bupati menyebut sebesar Rp 17,4

miliar untuk lima BUMD. Yaitu PT Bank Pembangunan Daerah Jateng Cabang Purwodadi sebesar Rp 10 miliar yang akan digunakan untuk meningkatkan pelayanan perbankan dan peningkatan ekspansi kredit kepada sektor produktif serta usaha menengah, kecil dan mikro, PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jateng sebesar Rp 1 miliar yang akan digunakan untuk memperkuat kapasitas penjaminan dan memperluas cakupan wilayah kegiatan usaha, Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan sebesar Rp 3,9 miliar, yang akan dipergunakan untuk pengadaan mobil tangki air, penggantian water meter, pembangunan sumur air dalam dan pengadaan genset intake Sidorejo. Kemudian kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank

Perkreditan Rakyat (BPR) Purwa Artha sebesar Rp 1,5 miliar yang akan digunakan untuk peningkatan pelayanan perbankan dan peningkatan ekspansi kredit kepada sektor produktif serta usaha menengah, kecil dan mikro, dan kepada Perusahaan Umum Daerah Purwa Aksara sebesar Rp 1 miliar yang akan dipergunakan untuk peningkatan kapasitas produksi pada unit perdagangan dan unit percetakan.

"Demikian penjelasan sa-

ya atas Raperda Penyertaan Modal Pemkab Grobogan kepada Badan Usaha Milik Daerah tahun anggaran 2024. Selanjutnya saya berharap bantuan dan kerja sama yang baik dari segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Grobogan guna penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah ini, sehingga dapat kita setuju bersama untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah pada saatnya nanti," harap Sri Sumarni. (Tas)-f



KR-M Taslim

Bupati Grobogan Sri Sumarni menjelaskan Raperda Penyertaan Modal Pemkab kepada BUMD pada rapat paripurna DPRD Grobogan.

Ratusan

"Masih banyak jemaah yang kurang mematuhi barang bawaan ini adalah hasil *sweeping* dari maskapai, ada air zam-zam, botol minuman, oleh-oleh sajadah, mainan anak-anak," ujarnya, Selasa (4/7).

Haryanto mengingatkan, para jemaah agar mematuhi ketentuan barang bawaan. Sebab, masih banyak jemaah yang membawa barang bawaan melebihi ketentuan yang diberlakukan pihak otoritas bandara dan maskapai penerbangan.

"Perlu diingat yang diperbolehkan hanya 1 tas tentang yang beratnya 7 kg. Barang barang yang di luar ketentuan akan dilarang dibawa," katanya.

Setelah ditimbang, barang dikirim ke gudang dan dilakukan X-ray apabila ditemukan air zam-zam di dalam koper, air zamnya yang dikeluarkan. Untuk koper besar, kata Haryanto, ketentuan berat maksimalnya 32 Kg.

Bagi jemaah yang membawa kursi roda, kata Haryanto, saat tiba di bandara kursi roda harus di

menambah biaya sebesar 35 Riyal. "Barang tercecer (yang tidak bisa dibawa) ini nanti kita jadikan laporan. Barang itu sudah diamankan sementara di gudang penampungan dan dilaporkan ke PPIH," ucapnya.

Senada, Kasi Pelayanan dan Kepulungan (Yanpul) Cecel Nusyamsi mengatakan, saat penimbangan barang bagasi, andai melebihi berat yang sudah ditentukan. Barang tersebut dikembalikan ke jemaah, selanjutnya terserah jemaah apakah mau dicargokan atau dititipkan ke temannya yang kopernya masih kurang kapasitas.

Sementara Selasa (4/7), ada 17 kelompok terbang dengan jumlah 6.613 jemaah yang diberangkatkan dari Makkah menuju ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah.

Setibanya jemaah haji di bandara, ada peman-tauan kesehatan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), selanjutnya jemaah naik bus sesuai rombongannya menuju asrama haji.

Sambungan hal 1

Koordinator Media Center Haji (MCH) PPIH Pusat Dodo Murtado mengatakan sejumlah debarkasi telah bersiap menyambut kedatangan pertama jemaah haji dari Tanah Suci. Saat di asrama haji, jemaah akan menerima air zamzam sebanyak 10 liter. Setelah koper diterima, para peserta haji dapat langsung pulang ke rumah masing-masing.

"Tiba di asrama, jemaah menerima air zamzam dan koper, setelah itu jemaah dapat kembali ke rumah dijemput keluarga masing-masing," jelasnya.

Pemulangan jemaah haji gelombang pertama melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah akan berlangsung mulai 4-18 Juli 2023.

Jemaah sakit yang dirujuk sampai kemarin berjumlah 402 orang, dengan rincian rawat jalan di Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Mekkah 25 orang, rawat inap di KKHI 170 orang dan rawat inap di RSAS 207 orang. Jemaah yang wafat hingga 3 Juli 2023 pukul 24.00 WIB bertambah 43 orang, total hingga kemarin berjumlah 337 orang. (Ati)-f

Tour

Hanya saja, Kus tak menjelaskan detail mana saja destinasi yang akan didatangi. "Agar menjadi kejutan untuk peserta," katanya.

Sementara soal pendaftaran, kata Kus, sudah dibuka sejak 13 Juni 2023 dan akan ditutup pada 21 Juli 2023, dengan biaya registrasi Rp 200.000 per sepeda motor. "Pendaftaran bisa dilakukan secara *online* melalui tautan *s.id/TDM23* atau langsung datang ke kantor Dispar Sleman, setiap Senin-Jumat di jam kerja," katanya.

Adapun sejumlah fasilitas yang akan didapatkan peserta yakni jaket, voucher makan, kupon *doorprize* dan asuransi. Peserta pun diperbolehkan menggunakan sepeda motor jenis dan merek apa saja. Syaratnya, sepeda motor memiliki kapasitas mesin di bawah 250 CC. Selain itu, pengendaranya juga wajib, memiliki SIM dan STNK serta menggunakan perlengkapan berkendara sesuai standar kepolisian.

Kus menjelaskan, sejumlah *doorprize* menanti peserta, di antaranya sepeda motor, sepeda, televisi, ponsel, laptop, kipas angin, dispenser, dan lainnya. (*)-f

Capres

Seperti yang diketahui, ambang batas presiden atau *presidential threshold* dalam Pilpres 2024 ialah sebesar 20% kursi parlemen atau 25% suara sah nasional. Tidak semua partai politik (parpol) mampu mengusung jagonya seorang diri, melainkan harus berkoalisi. Dinamika politik yang sangat cair membuat segala kemungkinan dapat terjadi. Adanya tokoh yang gagal dicalonkan atau bahkan munculnya nama tokoh tak terduga yang justru dicalonkan, dapat terjadi sewaktu-waktu. Di tengah situasi yang serba belum pasti tersebut, sedikit saja lengah, tiket pencalonan bisa saja melayang kapan saja. Tidak heran, apabila di masa-masa *ekritis* tersebut para kandidat capres akan mengoptimalkan segala sumber daya yang mereka punya untuk mengamankan dan memperkuat posisinya.

Apabila melihat komposisi pemilih pada pilpres 2024 berdasarkan riset CSIS, pemilih berusia 17-39 tahun diprediksi akan mendominasi, yakni mendekati angka 60%. Artinya, para kandidat perlu lebih giat lagi dalam menarik simpati generasi milenial tersebut. Media sosial (medsos) adalah salah satu arena pertarungan para kandidat untuk mempertahankan atau memperolehi kursi pencalonannya. Peralannya, medsos digunakan secara masif oleh generasi muda untuk banyak hal, salah satunya untuk menentukan preferensi politik.

Dahulu, publik hanya dapat mendapatkan berita-berita politik di media konvensional seperti televisi, koran, dan radio. Media konvensional masa lampau cenderung memberikan informasi satu arah, yakni dari sisi media saja. Kehadiran medsos menghadirkan peluang bagi publik untuk menuangkan perspektifnya sebagai wacana alternatif untuk memberikan keseimbangan informasi.

Seiring bergulirnya waktu, segala sesuatu yang *eviral* di medsos, lantas turut mempenga-

ruhi opini publik di dunia nyata. Dalam dunia politik, penggunaan medsos sebagai media kampanye sudah banyak dilakukan sejak munculnya internet. Pilpres dan pilkada di beberapa kota besar yang telah berlangsung setidaknya dalam satu dekade terakhir ini, menjadi saksi betapa medsos memberikan kontribusi besar bagi dinamika politik tanah air.

Dalam konteks pilpres, penggunaan medsos menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi publik. Peluang tersebut salah satunya ialah adanya kesempatan untuk turut memberikan pengawasan kepada para kandidat melalui informasi yang tersebar di medsos. Di sisi lain, tantangannya yakni publik akan kebingungan untuk menyaring informasi yang kian membludak, antara informasi relevan dan tidak, sudah dalam kondisi tercampur-aduk. Pihak yang *ekebeleti* berkuasa akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan posisi, termasuk dengan menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian. Publik tentu masih belum lupa bagaimana dua hal tersebut memberikan efek distorsif bagi integritas bangsa.

Melihat komposisi pemilih yang didominasi generasi muda, bukan tidak mungkin bahwa medsos akan menjadi *game changer* dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Para pemegang kekuasaan politik dan masyarakat dapat menganalisa bursa capres dalam medsos yang sangat dinamis secara *real time*.

Padahal medsos hanyalah refleksi dari personalitas seseorang yang sangat mungkin untuk dimanipulasi. Sehingga dalam mengonsumsi informasi di dalamnya diperlukan pemikiran yang kritis. Popularitas memang menawarkan elektabilitas. Namun belum tentu menawarkan kualitas.

(Penulis adalah Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Mahasiswa Doktoral KMITL Thailand)-f

Pemilih

Oleh karena itu, Bawaslu meminta KPU berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengatasi persoalan tersebut. Lebih lanjut, Betty menyampaikan, pihaknya memasukkan pemilih yang kini belum berusia 17 tahun ke dalam DPT, karena mereka akan berusia 17 tahun pada hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

Penentuan seseorang berusia 17 tahun pada hari pencoblosan itu, tambahnya, merujuk pada data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) dari Kemendagri dan hasil verifikasi lapangan oleh KPU.

Komisiner KPU Kabupaten Jember Ahmad Hanafi mengatakan ada lima nama unik dengan satu kata, yakni Tuhan masuk dalam DPT Pemilu 2024 di Kabupaten Jember Jawa Timur. "Jumlah pemilih bernama Tuhan berkurang satu dibandingkan pada Pemilu 2019 yang tercatat enam orang, karena satu orang diantaranya sudah meninggal dunia," katanya

di Kantor KPU Jember, kemarin.

Menurutnya, lima pemilih bernama Tuhan tersebut berada di Desa Tutul Kecamatan Balung, Desa Pringgowirawan dan Desa Karangbayat di Kecamatan Sumberbaru Kelurahan Slawu di Kecamatan Patrang dan Desa Kemuninglor di Kecamatan Arjasa.

"Nama Tuhan di Desa Tutul masuk sebagai pemilih di TPS 22, kemudian Tuhan di Desa Pringgowirawan di TPS 19, Tuhan di Desa Karangbayat di TPS 12, Tuhan di Kelurahan Slawu masuk TPS 12 dan pemilih Tuhan di Desa Kemuninglor terdaftar di TPS 13," tuturnya.

lalu, mengatakan nama Tuhan tersebut bukan kali pertama masuk dalam DPT Pemilu 2019, namun sudah terdaftar dalam DPT pada pemilu sebelum-sebelumnya dan namanya memang seperti itu, sehingga bukan hasil rekayasa. (Ant/Obi)-f

Komisi D Minta BBWS Serayu Opak Siapkan Ketersediaan Air Untuk MT III



Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri saat menerima cideramata dari Kepala Bidang Operasi & Pemeliharaan BBWS Serayu Opak Antyarsa Ikana Dani. (Foto-Humas)

UNTUK persiapan menghadapi musim kemarau yang melanda seluruh wilayah Indonesia, termasuk wilayah Jawa Tengah, Komisi D DPRD Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja ke Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu-Opak yang berkantor di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), untuk mendiskusikan sejumlah persoalan terkait dengan musim kemarau tahun ini.

Demikian dikatakan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri kepada wartawan usai kunjungan kerja ke Sleman, pekan lalu. Komisi D ingin mengetahui persiapan BBWS Serayu Opak terkait ketersediaan air terutama untuk musim tanam (MT) III. Dalam pertemuan itu juga disinggung masalah sedimentasi di jaringan irigasi sungai yang menjadi kewenangan Balai dibawah Ditjen Sumber

Daya Air Kementerian PUPR.

"Kami ingin mengetahui bagaimana persiapan BBWS Serayu Opak menghadapi musim kemarau. Ini terkait dengan ketersediaan air daerah irigasi yang menjadi kewenangan pusat di wilayah Jawa Tengah. Selain itu, tingginya sedimentasi menyebabkan aktivitas saluran berkurang sedangkan kegiatan normalisasi tidak mungkin dilakukan mengingat adanya keterbatasan anggaran," tutur Alwin Basri. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Operasi & Pemeliharaan BBWS Serayu Opak Antyarsa Ikana Dani mengatakan, tahun ini wilayah Indonesia mengalami musim kemarau yang lebih panjang dikarenakan adanya dampak El-Nino. Menghadapi musim kemarau panjang tersebut, diperlukan efisiensi penggunaan air sehingga ketersediaan air

dapat terjaga.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut BBWS Serayu Opak melakukan persiapan dengan mengecek hidroklimatologi prakiraan awal musim kemarau, mengecek ketersediaan air surplus atau defisit, dan melakukan pelestarian kawasan konservasi sumber mata air di wilayah BBWS.

BBWS Serayu-Opak juga telah melakukan pemetaan potensi lokasi sumber air di wilayah BBWS Serayu-Opak, seperti di wilayah Purworejo terdapat infrastruktur yang dapat dimanfaatkan. Salah satunya sumber air yang ada di Kecamatan Kaligesing.

Anggota Komisi D Samirun mengungkapkan perlunya normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Kaliyasa dan Sungai Serayu yang merupakan jangkauan BBWS Serayu-Opak. Komisi D DPRD Jawa Tengah ber-

harap segera dilakukan normalisasi DAS yang memiliki sedimentasi tinggi terutama di wilayah sungai kaliyasa yang hampir 36 tahun tidak pernah disentuh oleh proyek normalisasi sungai.

Menanggapi hal itu, Antyarsa mengatakan, terkait sedimentasi di Daerah Aliran Sungai yang menyebabkan aliran air tidak optimal, pihak BBWS Serayu-Opak terus melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemprov Jawa Tengah untuk mempercepat proses normalisasi

"Kami sudah mengusulkan kepada Gubernur Jawa Tengah agar proyek normalisasi sejumlah sungai yang memiliki sedimentasi tinggi, bisa segera dilakukan. Kami berharap proses normalisasi segera dilakukan agar fungsi DAS dapat kembali optimal," tutur Antyarsa. (Adv/Bdi-Anif Maghfiroh)